

**PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD114)
MELALUI INTERNET (IFLGR) DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

**Daniel Wicaksono Adhi Prabowo
POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO**

ABSTRACT

This study focuses on the application of Internet Financial Local Government Report (IFLGR) and it's influencing factors after the issuance of legislation of openness of public information and the influences significantly on the Minister of Home Affairs No.188.52 / 1797 / SJ in 2012, in which is all about the effort embodiment of Good Government. Selected population in this study were all provinces in Indonesia which publishing budget transparency on their official website.

Selected factors is have consist of politic competition, total assets of local government (kay), leverage (lev), the degree of independence (tk), the level of GDP (pd), and BPK audit opinion. By using binary logistic regression with alpha 5%. The results show that the level of independence influential in the implementation of Internet Financial Local Government Report (IFLGR), while the rests of variables do not.

Key word: IFLGR, politic competition, total assets of local government, leverage, the degree of independence, the level of GDP, and BPK audit opinion

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penerapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui website resmi pemerintah daerah (IFLGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi setelah muncul undang-undang keterbukaan informasi publik dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ tahun 2012, di mana kesemuanya merupakan upaya perwujudan *Good Government*. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang menerbitkan transparansi anggaran pada website resmi mereka.

Faktor-faktor (variabel independen) yang dipilih adalah kompetisi politik (kopol), kekayaan daerah (kay), *leverage* (lev), tingkat kemandirian (tk), tingkat PDRB (pd), dan opini BPK. Alat analisis yang digunakan adalah regresi logistik bienr dengan alpa 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh dalam penerapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui website (internet) resmi pemerintah daerah (IFLGR), sedangkan yang lain tidak berpengaruh.

Kata Kunci: IFLGR, Kompetisi Politik, Kekayaan Daerah, Leverage, Tingkat Kemandirian, PDRB, Opini BPK

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah di Indonesia yang sebenarnya telah dilaksanakan sejak masa Orde Baru dengan Undang-undang (UU) No.5 Tahun 1974, secara lebih serius diterapkan di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru dengan diterbitkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian diganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diganti Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerbitan peraturan mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan awal berjalannya desentralisasi di Indonesia.

Pasal 1 ayat (5) UU No.32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pasal 1 ayat (13) mengamanatkan bahwa "Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan". Transfer dari Pusat yang dilaksanakan secara adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab membawa kewajiban yang sama bagi Pemerintah Daerah sebagai penerima dana. Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Bappenas (2007) pemerintah dalam arti yang paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan "pemerintah" menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya.

World Bank dalam <http://governance-indonesia.com> mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut Bappenas (2007), ada empat belas nilai yang menjadi prinsip *good governance*:

1. Wawasan ke depan (*Visionary*)
2. Transparansi (*Transparency*)
3. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
4. Akuntabilitas (*Accountability*)
5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
6. Demokrasi (*Democracy*)
7. Profesionalisme dan kompetensi (*Profesionalism and Competency*)
8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
9. Efisien dan Efektif (*Efficiency and Effectiveness*)
10. Desentralisasi (*Decentralization*)

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)
13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*Commitment to Environmental Protection*)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

International *Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang berada di bawah naungan *International Federation of Accounting* (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan sejak 1977 (Putut Waryanto). IPSASB sendiri turut mendorong pengungkapan informasi keuangan kepada masyarakat dengan mengeluarkan IPSAS Nomor 22 yang berjudul "*Disclosure of Financial Information about the General Government Sector* (Pengungkapan Informasi Keuangan mengenai Sektor Pemerintah Umum)". (Putut Waryanto)

Menurut Bappenas (2007), ada beberapa Perangkat Pendukung Indikator Transparansi yaitu: peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, pusat informasi, *website*, iklan layanan masyarakat, media cetak dan elektronik, papan pengumuman, pameran pembangunan/pameran keuangan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, contohnya dengan memanfaatkan media internet. Berdasarkan pernyataan undang-undang tersebut, setiap data yang menunjang penelitian mengenai pelaporan informasi keuangan sektor publik seharusnya dapat diakses oleh setiap pemohon informasi publik dengan kejelasan atas penggunaan informasi tersebut Sutaryo dkk (2013).

Salah satu perwujudan transparansi yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah adalah mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara sukarela di internet, sehingga seluruh *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan menggali informasi keuangan yang ada di lingkungan pemerintah. Penggunaan internet sebagai media penyebaran informasi yang dapat diakses siapapun, hal ini juga dapat menunjukkan adanya suatu bentuk transparansi.

Teknologi informasi memungkinkan tersedianya informasi-informasi penting secara tepat dan cepat serta dapat memberikan kontribusi bagi proses administrasi yang lebih transparan. Pengungkapan sukarela LKPD di internet dinilai efektif dan efisien meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan IFLGR sebenarnya menjawab beberapa hal secara bersamaan. IFLGR mampu mewujudkan salah satu indikator dari prinsip transparansi yang ditentukan oleh Bappenas, di mana penerapan itu diwujudkan dengan biaya yang relatif rendah. Sejalan dengan itu, IFLGR juga dapat menjadi fondasi untuk penerapan *e-government* mendatang. Program pemerintah pusat untuk membangun *e-government* semakin nyata dengan dimulainya *e-audit* oleh BPK pada tingkat provinsi dan munculnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SJ tahun 2012, tentang transparansi pengelolaan anggaran kepada publik.

Pada kenyataannya, di Indonesia terdapat beragam kondisi dimana belum semua pemerintah daerah provinsi memiliki situs resmi aktif yang terpelihara dengan baik dari sisi muatan maupun berita terkini. Selain itu, belum semua pemerintah daerah provinsi yang telah memiliki situs resmi menerbitkan LKPD mereka pada situs resmi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan suatu pemerintah daerah provinsi dalam mengungkapkan informasi keuangan kepada masyarakat melalui situs resmi mereka.

Hasil penelitian Laswad *et.al* (2005) menunjukkan bahwa “pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet dapat diprediksi berdasarkan tingkat *financial leverage*, *municipal wealth*, *press visibility* dan *council type*. Sedangkan *local authority size* dan *level of political competition* tidak dapat digunakan untuk memprediksi ada atau tidaknya *Internet Financial Reporting (IFR)* oleh pemerintah daerah di Selandia Baru.”

Hasil penelitian Sutaryo dkk (2013), *Leverage* dan *Local Government Wealth* terbukti berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan di internet, sedangkan *Size* tidak terbukti mempengaruhi pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah di internet. Akan tetapi, *Political Competition* terbukti berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan di internet. Semakin tinggi level *political competition*, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan yang mudah dan murah juga akan semakin tinggi. Informasi tersebut dapat mencerminkan bukti kinerja pemerintah daerah. Adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya. Tipe pemerintah daerah tidak terbukti signifikan terhadap pelaporan informasi keuangan di internet.

Hasil penelitian Garcia (2010) menunjukkan bahwa *size*, *leverage*, *capital*, *investment*, *political competition* berpengaruh positif, sedangkan *press visibility* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah melalui internet.

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada sektor publik sudah banyak diteliti. Namun, untuk penelitian pada praktek pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang mengungkapkan informasi keuangan pada media internet masih sangat minim, khususnya di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini akan menguji dan mencari pembuktian empiris pengaruh kompetisi politik (*political competition*), kekayaan pemerintah daerah (*assets*), *leverage*, tingkat kemandirian daerah, tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), tipe pemerintahan daerah (*type*), dan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD suatu daerah terhadap penerapan *Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR)*. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul “Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui internet (IFLGR) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.”

II. MODEL PENELITIAN DAN HIPOTESIS

A. Perumusan Model Penelitian

Menurut Brian L. Connelly *et.al* (2011), *signaling theory* dijelaskan sebagai berikut:

“*Signaling theory is useful for describing behavior when two parties (individuals or organizations) have access to different information. Typically, one party, the sender, must choose whether and how to communicate (or signal) that information, and the other party, the receiver, must choose how to interpret the signal. Accordingly, signaling theory holds a prominent position in a variety of management literatures, including strategic management, entrepreneurship, and human resource management.*”

Evans, John H and Patton, James M. Dalam penelitian tahun 1987 menjelaskan *signalling theory* adalah berbagai sinyal yang dikirim oleh pihak pengemban amanat (dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) nantinya akan digunakan oleh pihak pemberi amanat (dalam hal ini adalah rakyat), untuk memberikan penilaian apakah amanat yang diberikan tersebut telah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Keberlanjutan dukungan dan kepercayaan rakyat tersebut sangat ditentukan oleh seberapa banyak rakyat mendapatkan sinyal-sinyal positif akan prestasi/kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, pengungkapan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, pengelolaan anggaran daerah, atau opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), merupakan contoh kecil bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemas dan memberikan berbagai sinyal positif bukti prestasi/kinerja mereka dalam merencanakan, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keuangan negara/daerah kepada rakyat.

Strategi komunikasi juga memainkan peran di sini. Jika kelompok yang mengatur ingin memenuhi komitmennya, tentunya akan tertarik menggunakan semua media pelaporan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada warga (Baber & Sen, 1984 dalam Laswad,dkk 2005). *Website* mungkin menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk pelaporan informasi Laswad dkk (2005).

Pada umumnya, pemerintahan daerah dengan kekayaan besar memiliki jumlah dan dana transfer yang besar pula. Laswad et.al. (2005) menghubungkan kinerja terhadap *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) dengan kekayaan pemerintah daerah. Dari penelitian tersebut, dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara kekayaan pemerintah daerah yang digambarkan dengan seberapa besar aset pemerintah daerah, dengan *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR).

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jumlah hutang yang dimaksud di sini mencakup jumlah dari hutang jangka panjang dan jangka pendek. Penting untuk *user* mengetahui laporan keuangan yang lebih rinci agar informasi mengenai *leverage* antar pemerintah daerah dapat diperbandingkan. Menurut Laswad et.al (2005); Lestari dan Chariri (2007) *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR).

Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dengan membandingkan antara besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja pada suatu periode yang sama. Robbins dan Austin (1986) menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kota berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kota. Adanya ketergantungan yang besar maka kemungkinan

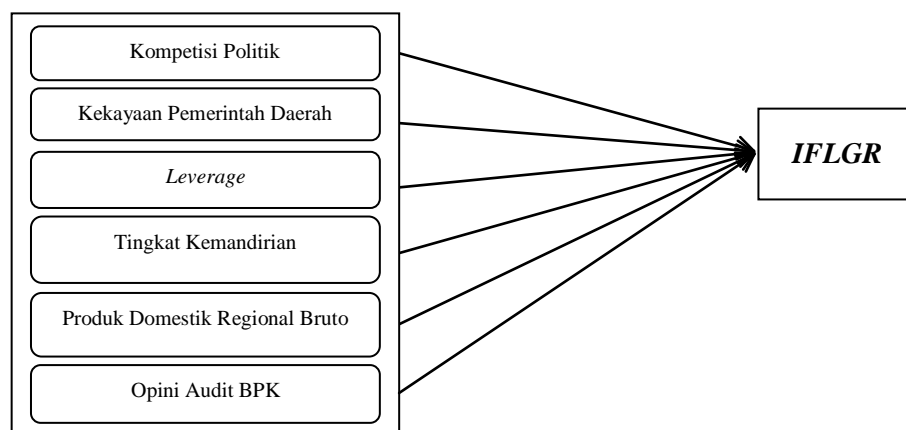
pemerintah pusat melakukan pembatasan operasi pemerintah daerah (kota) dan meminta pengungkapan lebih untuk memonitor kinerja pemerintah daerah (kota) dengan pembatasan operasi tersebut. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tingkat pendapatan per kapita daerah merupakan ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita mencerminkan perbandingan tingkat produktifitas tiap penduduk di suatu wilayah. Semakin besar proporsi pengguna internet, semakin besar pula potensi masyarakat menggunakan layanan internet sebagai media untuk memperoleh informasi keuangan pemerintah daerahnya *Serrano et. al.* (2008). Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula *political monitoring* oleh masyarakat dan semakin tinggi permintaan informasi yang disediakan pada situs resmi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah *Styles and Tennyson* (2007).

Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (*transparency*) dan terbuka (*openness*) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Menurut Islamy Irfan dalam Widodo (2001) transparansi dan keterbukaan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya. Melalui transparansi pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah. Dengan demikian, masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya Widodo (2001).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Model Penelitian



B. Hipotesis

Penelitian terkait penerapan IFLGR (*voluntary disclosure*) oleh pemerintah daerah telah dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Reformasi pelaporan keuangan sektor publik di Selandia Baru pada awal 1999 mendorong penelitian tentang pengungkapan secara sukarela via internet yang dilakukan oleh *Lasward et.al* pada tahun 2005. Mereka meneliti 86 *website* pemerintah lokal Selandia Baru yang terdiri dari 12 pemerintah

regional/provinsi, 15 pemerintah kota, dan 59 *distric council*. Tujuan penelitian mereka adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela *Internet Financial Reporting* (IFR) di antara pemerintah lokal. Hasil penelitian menunjukkan *leverage*, kekayaan pemerintah lokal, *press visibility*, dan jenis/tipe *council* memiliki hubungan dengan praktek IFR pada pemerintah lokal Selandia Baru.

Styles and Tennyson pada tahun 2007 melakukan penelitian terhadap ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses data keuangan pemerintah lokal pada internet. Mereka mengambil 300 sampel pemerintah daerah di Amerika Serikat dengan berbagai ukuran daerah. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan data keuangan dipengaruhi oleh ukuran daerah, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat pengungkapan. Sedangkan kemudahan aksesibilitas dipengaruhi positif oleh populasi, pendapatan per kapita, dan tingkat hutang.

Rora (2010) menganalisis tingkat pengungkapan secara sukarela pada situs resmi pemerintah daerah. Rora mengukur tingkat pengungkapan sukarela berdasarkan jumlah pengungkapan konten, persentasi pengungkapan, dan total pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah. Ia menguji apakah kinerja pemerintah, tingkat ketergantungan, dan karakteristik pemerintah daerah dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Hasil penelitian didapat bahwa hanya tingkat ketergantungan daerah saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada konten situs, sedangkan tingkat persentasi pengungkapan hanya dipengaruhi oleh kompleksitas pemerintah dan tingkat ketergantungan daerah. Total keseluruhan pengungkapan pada situs pemerintah daerah hanya dipengaruhi tingkat ketergantungan daerah.

Garcia (2010) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan informasi akuntansi secara *online* oleh pemerintah daerah. Variabel dependen yang digunakan adalah *reporting index*. Variabel independen yang digunakan adalah *size*, *leverage*, *capital investment*, *political competition*, dan *press visibility*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, *leverage*, *capital investment*, *political competition* berpengaruh positif terhadap pelaporan informasi akuntansi secara online oleh pemerintah daerah. Sedangkan *press visibility* berpengaruh negatif.

Medina (2012) melakukan penelitian untuk menguji tingkat ketersediaan dan aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Variabel yang digunakan adalah ukuran, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintah, dan pendapatan per kapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, rasio kemandirian, dan kompleksitas berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemda. Pendapatan per kapita berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

Afryansyah dan Hartono (2013) melakukan penelitian untuk menguji faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Variabel independen yang digunakan Ukuran, tingkat investasi, kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, dan *press visibility*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Press Visibility* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi akuntansi di internet. Ukuran, tingkat investasi, kekayaan pemerintah daerah, kompetisi

politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi akuntansi di internet.

Dari perumusan model penelitian dan penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap penerapan IFLGR oleh pemerintah daerah
- H₂ : Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) oleh pemerintah daerah.
- H₃ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penerapan *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) oleh pemerintah daerah.
- H₄ : Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap penerapan *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) oleh pemerintah daerah.
- H₅ : Tingkat PDRB berpengaruh positif terhadap penerapan *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) oleh pemerintah daerah.
- H₆ : Opini Audit BPK atas LKPD suatu daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) oleh pemerintah daerah.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner, dengan menggali data sekunder berupa LKPD Provinsi seluruh Indonesia. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Log IFLGR (P/(1-P))} = \beta_0 + \beta_1 \text{KomPol} + \beta_2 \text{Kay} + \beta_3 \text{Lev} + \beta_4 \text{TK} + \beta_5 \text{PD} + \beta_6 \text{OB} + e$$

Tabel 3.1. Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi
IFLGR	Penerapan IFLGR (penyediaan informasi keuangan) pada situs resmi pemerintah daerah.
KomPol	Kompetisi Politik (Indeks Herfindahl-Hirschmann)
Kay	Kekayaan Pemerintah Daerah (\ln Total Aset)
Lev	<i>Leverage</i> (Total Kewajiban Jangka Panjang / Total Ekuitas)
TK	Tingkat Kemandirian (Total PAD / Total Pendapatan)
PD	Produk Domestik Regional Bruto (Tingkat Pendapatan per Kapita = \ln PDRB)
OB	Opini audit BPK (<i>scoring</i> – WTP diberi <i>score</i> 4, WDP diberi <i>score</i> 3, TW diberi <i>score</i> 2, MMP diberi <i>score</i> 1)
β_{0-7}	Koefisien regresi
E	Koefisien error

IV. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Data

Pengujian hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menggunakan pengujian dengan analisis regresi logistik biner. Hasil regresi logistik biner yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 *Variables in the equation* untuk model regresi

	<i>B</i>	<i>S.E.</i>	<i>Wald</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>	<i>Exp(B)</i>
KOMPO	-1.398	3.628	.148	1	.700	.247
L						
KAY	-.301	.353	.729	1	.393	.740
LEV	-1.559	1.300	1.438	1	.230	.210
TK	12.220	5.338	5.242	1	.022	202860.202
PD	.026	.553	.002	1	.962	1.027
OB	.300	.831	.130	1	.718	1.350
Constant	5.384	9.395	.328	1	.567	217.965

Sumber : data output SPSS, 2015

Berdasarkan persamaan di atas, kita tidak dapat langsung menginterpretasikan, tetapi kita melihat *odd ratio* atau komponen *Exp (B)* pada tabel di atas. Kita dapat menginterpretasikan bahwa setiap terjadi kenaikan penerapan IFLGR, maka akan terjadi penurunan kompetisi politik sebesar 0,247, penurunan tingkat kekayaan sebesar 0,740, penurunan tingkat *leverage* sebesar 0,210, kenaikan tingkat kemandirian daerah sebesar 202.860,202, kenaikan PDRB sebesar 1,027, dan kenaikan opini BPK sebesar 1,350. Dan setiap kenaikan 1 satuan, maka akan terjadi kenaikan sebesar 217,965.

Koefisien yang digunakan dalam persamaan regresi di atas adalah menggunakan nilai β yang dihasilkan oleh output regresi logistik di atas. Dari hasil output di atas dijelaskan bahwa variabel Kompetisi Politik (KomPol) menghasilkan nilai sebesar 0,148 pada signifikansi 0,700 ($sign > 0,05$) artinya KomPol tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan IFLGR. Kay, Lev, PD dan OB juga menghasilkan nilai yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan IFLGR. Secara Berturut-turut, pengaruh variabel X terhadap Y yaitu Kay sebesar 0,729 (signifikansi 0,393), Lev bernilai 1,438 pada signifikansi 0,230, PD bernilai 0,002 pada signifikansi 0,962 dan OB bernilai 0,130 pada signifikansi 0,718. Nilai signifikansi $> 0,05$ mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen (Kay, Lev, PD dan OB) terhadap variabel dependennya. Sedangkan hasil dari variabel TK berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan IFLGR sebesar 5,242 pada tingkat signifikansi 0,022. Dengan demikian dapat disimpulkan dengan melihat nilai signifikansi dihasilkan bahwa hanya Tingkat Kemandirian (TK) berpengaruh signifikan terhadap penerapan IFLGR pada provinsi-provinsi di Indonesia sementara variabel Kompetisi Politik, Kekayaan Pemprov, Leverage, Tingkat PDB dan Opini BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan IFLGR.

B. Pembahasan

Hasil hipotesis 1 ditolak sebenarnya dimungkinkan disebabkan oleh beberapa alasan Pertama, kompetisi politik yang dilakukan di Indonesia, yang diukur dengan menggunakan indeks Herfindahl yang didasarkan pada hasil pemilu kepala daerah (pemilukada) tidak mampu menjelaskan kompetisi

politik yang ada. Penyebabnya adalah karena pemilukada yang di lakukan di propinsi di wilayah Indonesia tidak dilakukan secara serempak, artinya hanya beberapa daerah saja yang melakukan pemilukada pada setiap tahunnya.

Kedua, tidak adanya partai oposisi yang menjadi pemberi kritik akan kebijakan pemerintah terutama pemerintah daerah. Sehingga media yang seharusnya digunakan dalam upaya memperlihatkan janji politik pada saat kampanye tidak digunakan secara maksimal. Di Indonesia, fungsi pengawasan pemerintah atau biasa disebut dengan fungsi legislatif dipegang oleh DPR. Untuk pemerintah daerah, diawasi oleh DPRD masing-masing wilayah propinsi. Kurangnya pengawasan DPR sebagai pemberi saran bagi pmeda dalam mempublikasikan laporan juga bisa dijadikan sebagai alasan selanjutnya. Hasil bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap penerapan IFLGR tersebut mengindikasikan bahwa beberapa pemerintah daerah telah melanggar komitmen mereka pada saat kampanye terutama dalam upaya pemeberian informasi publik terkait transparansi anggaran pemerintah daerah yang bisa langsung diakses pada website masing-masing. Dengan hasil ini, hal ini juga mengartikan bahwa para *politikus* yang mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah (terutama calon terpilih) tidak mempertimbangkan transparansi dan akuntabilitas terutama dalam pelaporan IFLGR sebagai bahan untuk mencalonkan diri kembali di periode berikutnya. Politikus ini menganggap bahwa ekspektasi untuk memenangkan pemilu berikutnya bukan berdasarkan pelaporan IFLGR sebagai salah satu bukti kinerja kepala daerah, namun lebih mengarah pada kinerja nyata yang terlihat di masyarakat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya milik Lasward *et.al* (2005), Garcia (2010) dan Sutaryo (2013) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetisi politik dan *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR). Namun, hasil penelitian ini sejalan dnegan penelitian Afriansyah dan Hartono (2013) yang menyatakan bahwa kompetisi tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet (IFLGR).

Hasil statistik untuk hipotesis 2 adalah ditolak, hal ini dimungkinkan karena hubungan kedua variabel tersebut dipengaruhi fenomena sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki pemerintah provinsi tidak akan mempengaruhi penerbitan atau transparansi laporan keuangan pada website masing-masing. Karena keraguan aparat pemerintah provinsi terhadap kualitas pernyataan (*disclosure*) atas jumlah kekayaan yang dimiliki, mengingat merebaknya fenomena pengungkapan total aset yang menjadi hal yang dikecualikan dalam opini BPK.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian milik Lasward *et al* (2005) dan Garcia (2010), yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap penerapan IFLGR di propinsi di Indonesia. Sedangkan Afriansyah dan Hartono (2013) menghasilkan simpulan yang sama dengan hasil penelitian tersebut.

Hasil statistik hipotesis 3 dalam penelitian ini **ditolak**. Penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo (2013). Sutaryo (2013) menyimpulkan bahwa pengaruh *leverage* yang positif terhadap kemampuan untuk menerapkan IFLGR karena informasi keuangan dan non keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dapat digunakan untuk

mengalihkan fokus utama masyarakat terhadap tingginya *leverage* pemerintah daerah.

Leverage yang dihasilkan dalam penelitian ini akan diperbandingkan antar pemerintah propinsi sehingga dapat diketahui sejauh mana pemerintah mampu menjamin dana yang dipinjam baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang menggunakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Namun pada penelitian ini menggunakan pembanding ekuitas untuk menjamin kewajiban yang dimiliki. Konsep yang digunakan artinya bukan merupakan konsep dengan rumus *debt of asset ratio* namun menggunakan rumus *debt of equity ratio*. Pada kenyataannya, lebih banyak pemerintah propinsi dengan hutang yang relatif sedikit daripada pemerintah propinsi yang memiliki hutang besar.

Hipotesis 4 dalam penelitian ini menghasilkan pengaruh sebesar 5,242 pada signifikansi 0,022 terhadap penerapan IFLGR. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menyebabkan hipotesis keempat pada penelitian ini **diterima**.

Penerimaan hipotesis ini sejalan dengan Garcia (2010) yang menyatakan bahwa kemandirian berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet. Hal tersebut lebih didukung oleh pendapat Robbins dan Austin (1986) yang menemukan hasil bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kota berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kota. Artinya ketergantungan yang besar maka kemungkinan akan membuat tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin besar.

Tingkat kemandirian pada penelitian ini diukur dengan membandingkan PAD dan total pendapatan yang diperoleh. Pada penelitian ini hasil yang berpengaruh dapat dijelaskan karena ukuran kemandirian setiap pemerintah provinsi mempengaruhi bagaimana seharusnya pengungkapan laporan keuangan publik itu berjalan. Kemandirian yang seharusnya diperlihatkan pemerintah daerah digunakan sebagai salah satu informasi yang memberikan bukti akan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik, dan sumber daya yang melakukan kewajiban melakukan pengungkapan juga harus senantiasa didukung.

Penolakan hipotesis 5 ini didukung dengan adanya fenomena di masyarakat bahwa sampai saat ini hanya segelintir orang yang masih menyoroti mengenai keuangan pemerintah daerah melalui internet. Meskipun tingkat PDRB yang tinggi mempengaruhi kemampuan penggunaan internet yang semakin besar, masyarakat saat ini lebih banyak menggunakan internet untuk mencari kebutuhan pribadi mereka akan *fashion*, gaya hidup dan lainnya. Artinya tidak ada pengaruh antara penggunaan internet yang besar terhadap permintaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kemungkinan lainya adalah karena adanya mosi tidak percaya masyarakat akan pelayanan publik, sehingga masyarakat akan terlihat cuek akan segala sesuatu yang dilakukan pemerintah daerah termasuk dalam penerapan IFLGR. Masyarakat akan meminta informasi terkait LKPD dalam internet ketika mereka membutuhkan dan selebihnya kemungkinan permintaan tersebut tidak ada.

Namun penelitian terdahulu tidak sejalan dengan penelitian ini dimana Medina (2012) menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap informasi keuangan pemerintah daerah pada situs pemerintah

daerah. Artinya semakin tinggi PDRB justru mengakibatkan semakin rendahnya informasi keuangan pada situs pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis 6 adalah **ditolak**. Dimungkinkan Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah sampai pada pemerintah propinsi. Pengaturan keuangan daerah pun pemegang peran sentral pada pemerintah propinsi, terlepas telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2015 tentang Keuangan Desa. Justru PP Keuangan Desa sendiri pada akhirnya mengikuti UU 32 Tahun 2010 tentang keuangan pusat dan daerah. Opini BPK memang memberikan penilaian lebih atas prestasi kerja pemerintah propinsi maupun pemerintah pemerintah provinsi dari sisi akuntabilitas. Kenyataan sekarang, pemerintah propinsi sudah banyak yang mendapatkan opini BPK minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang dalam penelitian ini termasuk kategori baik. Pemerintah Propinsi saat ini justru dikejar untuk mencapai tingkat kemandirian yang baik, sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Mungkin hal ini yang menyebabkan Opini BPK tidak mempengaruhi penerapan IFLGR, dikarenakan selain sudah mencapai Opini yang baik juga dimungkinkan fokus pemerintah propinsi mulai pada peningkatan pencapaian otonomi daerah secara lebih baik.

Selain itu, dalam beberapa kasus belakangan ini dapat kita temui fenomena baru di mana pemerintah daerah provinsi yang mendapat opini WTP atau WDP oleh BPK atas LKPD, tidak lepas juga dari kasus korupsi. Kasus korupsi itu sendiri biasanya disinyalir dilakukan oleh kepala pemerintah daerah provinsi atau aparat pemerintah daerah provinsi itu sendiri.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kompetisi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemerintah daerah provinsi di Indonesia menerapkan IFLGR.
2. Kekayaan daerah berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemerintah daerah provinsi di Indonesia menerapkan IFLGR.
3. Tingkat *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemerintah daerah provinsi di Indonesia menerapkan IFLGR.
4. Tingkat kemandirian berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemerintah daerah provinsi di Indonesia menerapkan IFLGR.
5. Tingkat pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemerintah daerah provinsi di Indonesia menerapkan IFLGR.
6. Opini BPK atas LKPD suatu daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemerintah daerah provinsi di Indonesia menerapkan IFLGR. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar pemerintah provinsi mendapat opini WTP atau WDP dari BPK.

B. Implikasi

1. Data Kompetisi Politik, yaitu jumlah suara kepala daerah pemenang dan total jumlah suara pemilih agak susah didapat. KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah juga tidak sepenuhnya memiliki data secara akurat. Hasil wawancara penulis dan pihak KPU Pusat, disampaikan bahwa tidak semua KPUD memberikan laporan secara mendetail kepada KPU Pusat.
2. Pelaksanaan pemilu yang belum serentak, menjadi kendala dalam mengukur tingkat kompetisi politik setiap propinsi. Penulis hanya melihat

dari masa jabatan 5 tahunan dan mengkaitkan dengan data tahunan yang terkait.

3. Belum semua pemerintah propinsi memiliki situs resmi yang terawat dan terbaru baik dari sisi data maupun dari sisi penataan. Data LKPD yang sejatinya dapat diambil dari situs resmi, belum tersedia sehingga penulis mengajukan permohonan ke BPK RI. Walaupun pada saat itu karena dalam masa transisi pergantian anggota DPR RI, maka BPK RI pun terkendala untuk mempublikasikan karena menunggu otorisasi dari Sekretariat DPR RI. Hal ini yang dimungkinkan menyebabkan data yang diberikan ada beberapa yang terselip atau tidak lengkap.
4. Beberapa variabel independen masih belum terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, namun ada juga yang sama.

C. Saran

1. Penelitian sejenis sebaiknya dilakukan pada waktu yang dekat dengan pemilihan kepala daerah (gubernur), supaya data terkait variabel kompetisi politik mudah untuk didapat.
2. Akhir-akhir ini pemerintah sedang mempersiapkan pemilukada serentak di Indonesia. Semoga keputusan tersebut dapat membantu penelitian sejenis, dan disarankan agar KPU sebagai komisi penyelenggara pemilukada dapat menyusun laporan seperti Pemilu Dalam Angka dengan lebih lengkap. Misalnya ditambahkan tingkat kompetisi politik, penyebaran suara pemenang, perbandingan kursi anggota dewan partai pendukung kepala daerah pemenang dengan kursi anggota dewan oposisi, kenaikan atau penurunan tingkat partisipasi pemilukada.
3. Sistem pemerintahan yang *online* sangat diharapkan guna memperbaiki pelayanan publik dan peningkatan efektivitas dan efisiensi, baik dalam penerapan *good governance* maupun dalam penerapan RPJP Nasional. Situs resmi (*website*) sebenarnya dapat menjadi sarana bagi pemerintah daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dalam berkomunikasi, baik dengan pemerintah di atasnya, para investor, maupun masyarakat luas pengguna jasa pemerintahan. Jika sistem telah terintegrasi, maka BPK dapat pula menerapkan *e-audit* secara lebih baik. Adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang transparansi anggaran, sebenarnya dapat juga didukung oleh BPK RI dengan menerbitkan seluruh LKPD baik propinsi maupun kabupaten, karena hal itu berbarengan dengan publikasi LKPD oleh pemerintah daerah terkait pada situs resmi mereka masing-masing.
4. Penelitian-penelitian sejenis masih perlu dilakukan guna mencapai penerimaan variabel secara empiris (*general*), mengingat saat ini telah disahkan pelayanan publik sampai ke tataran desa. Penelitian sejenis mampu menguatkan dan membantu pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan IFLGR, supaya tidak tertinggal dari pemerintah desa. Hal ini dikarenakan undang-undang otonomi daerah saat ini masih terstruktur dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah propinsi sebagai koordinatornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry., Asmara, John Andra. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah*; Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 23-26 Agustus 2006. (<https://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/syukriy-abdullah-dan-jhon-andra-asmara/>)
- Adisasmita, Rahardjo. (2010). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Makasar.
- Afryansyah, Rahmat. D dan Hartono. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013. <http://ejournal-si.undip.ac.id>. (Diakses pada 24 Agustus 2014 pukul 18.45WIB).
- Almilia, L. S. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial and Sustainability Reporting*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. 12 (2).
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.
- Bappenas (2007), *Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia 2007*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Departemen Dalam Negeri, 1991, "Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Evans, J., Patton, J., 1987. *Signaling and monitoring in public sector accounting*. Journal of Accounting Research 25 (Supplement), 130–158.
- Fadzil, Faudziah Hanim, dan Nyoto, Harryanto. (2011). *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*. World Review of Business Research Vol 1 No, 2 pp 51-70.
- Garcia, Ana Carcaba. Jesus Garcia-Garcia. 2010. *Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities*. Local Government Studies, Volume 36, Issue 5.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. *Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation*. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001.
- Gozhali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*, Edisi 7. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Groff, J.E, & Pittman, M.K., (2004). *Municipal Financial Reporting on The World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on The Official Websites of The 100 Largest U.S. Municipalities*. Journal of Government Financial Management, 53 (2), 20-30.
- Hendriksen, Eldon S. dan Michael F. Van Breda, 2002. *Teori Akuntansi*, diterjemahkan oleh Herman Wibowo, edisi V, jilid 2. Interaksara. Jakarta.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia; diakses pada 20 Agustus 2014 pukul 10.41WIB
- <http://bappenas.go.id>; diakses pada 15 Agustus 2014 pukul 11.06WIB.
- <http://governance-indonesia.com>; diakses pada 25 Agustus 2014 pukul 15.23WIB.
- <http://fenaro.narotama.ac.id/.../PENGARUH%20POSTMOD...>, diakses pada 5 September 2014 pukul 14.22WIB.

- Laswad, F., Richard F., dan Peter O. 2005. *Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy. 24: 101-121.
- Lestari, H. S. dan A. Chariri. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan . Working Paper FE UNDIP.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. Skripsi Sarjana. <http://lontar.ui.ac.id>. (Diakses tanggal 7 September 2014 pukul 19.31WIB).
- Moon, M Jae. 2002. "The Evolution of E-Government Among Municipalities: hetic or Reality?". Public Administration Review. Vol 62, No 4. pp: 424-433.
- Mudradjat Kuncoro, 1997, "Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Nordiwawan, D. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. "Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda". Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin tanggal 20-23 September 2012.
- Prasojo, Eko, Maksum, Irfan Ridwan, dan Kurniawan, Teguh. (2006). Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok.
- Rawlins, B. L. 2008. *Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust*. Public Relations Journal.
- Robbins, Walter A., dan Austin, Kenneth R. (1984). *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*. Journal of Accounting Research. Vol 24. No. 2. pp 412-421.
- Sekaran, Uma. (2010). *Research Method For Business (5th ed.)*. United States: Willey.
- Serrano, C., Mar R., dan Pilar P. 2008. *Factors Influencing E-Disclosure In Local Public Administrations*. Documento de Trabajo-03 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Zaragoza.
- Strom, K. 2000. *Delegation and accountability in parliamentary democracies*. European Journal of Political Research 37: 261-289.
- Styles, Alan K and Tennyson, Mack. 2007. "The Accessibility of Financial Reporting US Municipalities on the Internet". Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Vol 19, No 1. pp: 56-92
- Sugiyanto, "Kemandirian dan Otonomi Daerah", Media Ekonomi dan Bisnis, Vol. XII, No. 1 Juni 2000.
- Sumarsono, Sonny. (2009). Manajemen Keuangan Pemerintahan. Graha Ilmu. Jember.
- Sutaryo, Aditya, R., dan Agus B. 2013. *Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi – Manado.
- Von Hogen, Jurgen. 2002. *Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance*. The Economic and Social Review 33(3): 263-284.
- Yudoyono, Bambang. (2001). Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Pustaka Sinar. Jakarta.

Zimmerman, Jerold L. 1977. "*The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives*". Journal of Accounting Research. Vol. 15, Studies on Measurement and Evaluation of the Economic Efficiency of Public and Private Nonprofit Institutions. pp. 107-144.

Metadata Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia; diakses dilaman

<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf>
pada 29 Oktober 2014 pukul 11.00WIB

_____, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

_____, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

_____, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

_____, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. _____, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

_____, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.